

## **ABSTRAK**

Ricardo Nathanael Ginting (01656170166)

### **NOTARILISASI PERJANJIAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI) PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)**

**(xii + 107 halaman)**

Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur mengamanatkan seluruh perjanjian pemanfaatan aset dibuat dalam akta notaris, termasuk salah satunya adalah Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Perjanjian KSPI biasa dibuat sebagai landasan pemanfaatan aset Negara dalam rangka pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Permasalahan muncul ketika konsep KPBU dan pembuatan akta KSPI oleh seorang notaris dinilai belum familiar di kalangan notaris itu sendiri. Penelitian ini membahas bagaimana urgensi dari notarilisasi suatu perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk KSPI untuk proyek KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan bagaimana peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menghadapi perkembangan suatu perjanjian, secara khusus terhadap kebutuhan atas pembuatan akta notaris KSPI untuk proyek KPBU. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Suatu perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur, yang dalam hal ini berbentuk Perjanjian KSPI untuk keperluan proyek KPBU penting untuk dibuat dalam bentuk akta notaris, karena akta notaril mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dan kekuatan pembuktian itu sendiri yaitu pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil dalam rangka pengamanan aset negara. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kendala dalam pelaksanannya maupun *output* dari pembinaan tersebut, diantaranya kegiatan pembinaan masih cukup jarang dilakukan di tingkat daerah dan kesadaran notaris akan pentingnya pengetahuan atas perkembangan suatu perjanjian, dan secara khusus mengenai akta KSPI cenderung masih rendah.

Kata Kunci: Pemanfaatan Aset, KSPI, Akta Notaris, kewenangan

Referensi: 34 (1990 – 2019)

## **ABSTRACT**

Ricardo Nathanael (01656170166)

### **NOTARILIZATION OF UTILIZATION AGREEMENT OF STATE OWNED GOODS IN THE FORM OF COOPERATION OF INFRASTRUCTURE PROVISIONS IN THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROJECT (PPP)**

**(xii + 107 pages)**

The Provisions of Minister of Finance Regulation Number 164/PMK.06/2014 on Implementation Procedures of State Owned Goods Utilization for the Infrastructure Provisions mandates all agreements of utilization assets shall be made in the form of notarial deed, and one of them is Cooperation Agreement of infrastructure Provisions ("KSPI Agreement"). The KSPI Agreement made as an implementation base the State asset utilization in order to develop infrastructure through PPP scheme as regulated under Presidential Regulation No. 38 of 2015 on Cooperation of the Government and the Business Entity for the Infrastructure Provisions. The issue arise when the PPP concept its relation with the KSPI agreement that shall be notarized by the notary tend not to be familiarized for the notary itself. This research examines how urgent the utilization agreement of State Owned Goods in the form of KSPI for PPP project shall be notarized and how Ikatan Notaris Indonesia facing the development of some agreements, particularly on the needs of KSPI Agreements for PPP Project to be notarized. The research methodology of this research is normative juridical with the approach of the related laws and regulations to the legal issues that have been researched. Based on the the reaseach, it may be concluded that the utilization agreement of State Owned Goods for infrastructure provisions, including KSPI Agreement for PPP Project is important to be made in the form of notarial deed, as notarial deed has the perfect evidence value, and such evidence strength are external, formal and material evidence in order to secure the State assets. Further, based on the research, there are some issues in terms of implementation and output of such developments and one of them are the development activity quite seldom to be implemented in the district and the notary level of awareness in order to have the knowledge towards the agreement developments, and particularly on KSPI notarial deed tends to be low.

**Keywords:** Asset Utilization, KSPI, Notarial Deed, Authority

**Reference:** 34 (1990 – 2019)